GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

DYNAMIC GOVERNANCE SEBAGAI MODEL TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MASYARAKAT INFORMATIF DI KABUPATEN SUMEDANG

Dewi Kurniasih[1], Rino Adibowo[2], Dwita Almeiya Hernita[3]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia
Email Korespondensi: dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

ABSTRACT

The transformation into a digital village has become essential for improving public service quality, information access, and community development. However, the implementation of the Digital Village initiative in Sumedang Regency still faces challenges regarding equitable distribution, infrastructure limitations, digital literacy, and human resource readiness. This study aims to analyze the Dynamic Governance model for Digital Villages in fostering an information-literate society in Sumedang Regency. A qualitative descriptive approach was employed, focusing on the Sumedang Regency Government and villages participating in the Digital Village development program. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The analysis utilizes the Dynamic Governance perspective, specifically focusing on the capabilities of "Thinking Ahead," "Thinking Again," and "Thinking Across." The findings indicate that Digital Village development is increasingly focused on the government's ability to anticipate technological advancements, enhance apparatus competence, utilize data, and foster innovations in village services and the local economy. The government is also promoting increased community digital literacy, the use of technology in service delivery, the development of Village-Owned Enterprise (BUMDesa) marketplaces, and the digitization of tourism potential. Nevertheless, the implementation of the Digital Village initiative requires further strengthening to ensure greater equity and sustainability.
Keywords: Dynamic governance, Digital village, Information-Literate society, Digital transformation.

ABSTRAK

Transformasi digital desa menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, akses informasi, dan pembangunan masyarakat. Namun, penerapan Desa Digital di Kabupaten Sumedang masih menghadapi persoalan pemerataan, keterbatasan infrastruktur, literasi digital, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis model Dynamic Governance Desa Digital dalam mewujudkan masyarakat informatif di Kabupaten Sumedang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dan desa yang menjadi bagian dari pengembangan Desa Digital. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan menggunakan perspektif Dynamic Governance, khususnya kemampuan *Thinking Ahead*, *Thinking Again*, dan *Thinking Across*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Digital mulai diarahkan pada kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan teknologi, meningkatkan kompetensi aparatur, memanfaatkan data, serta mengembangkan inovasi pelayanan dan ekonomi desa. Pemerintah juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, pengembangan marketplace BUMDesa, dan digitalisasi potensi pariwisata. Meskipun demikian, implementasi Desa Digital masih perlu diperkuat agar lebih merata dan berkelanjutan.
Kata kunci: Dynamic governance, Desa digital, Masyarakat informative, Transformasi digital.

PENDAHULUAN

Cepatnya pengaruh teknologi terhadap aspek kehidupan manusia, pada akhirnya memunculkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat maupun

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

perbaikan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan masyarakat terhadap dinamisnya pergerakan pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya membuat pemerintah harus lebih cepat bergerak dan beradaptasi dengan perubahan, khususnya pada penggunaan teknologi informasi. Pemerintah, khususnya di era ini dituntut untuk sedapat mungkin mampu beradaptasi dengan lingkungan dan situasi terbaru, ide-ide baru, asumsi baru, rela serta mau mengalami perbaikan dan koreksi terus-menerus, menghasilkan keputusan yang sangat cepat, serta dapat menghasilkan inovasi pada produk pemerintahan yang kreatif dan tentunya solutif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat **(Afriyani et al., 2021)**.

Desa digital Indonesia, berdasarkan Kementerian Pedesaan pada tahun 2024 berjumlah 75.265 desa. Hal ini merupakan masih minim jumlah desa di Indonesia berjumlah 84.276 desa. Namun berdasarkan Badan Pusat Statistik desa digital tahun 2021 dominan berada di pulau Jawa saja. Menjadi catatan dalam pengembangan desa digital berada di Indonesia

Program Desa Digital Indonesia merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembangunan desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat desa, menyediakan akses internet yang terjangkau, dan mengembangkan berbagai aplikasi berbasis TIK untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan desa. Program Desa Digital Jawa Barat diluncurkan pada tahun 2015. Pada tahap awal, pertama kali desa Cibiru, Kota Bandung sebagai desa digital pertama di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, perguruan tinggi, dan perusahaan swasta untuk menyediakan infrastruktur TIK seperti jaringan internet dan komputer, serta menyelenggarakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat desa. Pemanfaatan TIK dapat membantu desa dalam hal pengolahan administrasi pemerintahannya agar lebih cepat, efektif dan efisien. **(Sari & Rusli, 2023)**.

Program Desa Digital di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah adanya keterbatasan infrastruktur TIK di desa, rendahnya literasi digital masyarakat desa, kesenjangan ekonomi antara desa dan kota serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang TIK di desa. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penerapan desa digital prosesnya masih mengalami beberapa masalah, seperti masih belum terintegrasinya layanan publik secara menyeluruh, sehingga masyarakat masih melakukan beberapa layanan yang berbeda setiap instansi dan dilakukan dengan cara terpisah. Kurangnya pemahaman masyararakat dengan adanya transformasi digital di desa serta transformasi digital belum complete, beberapa layanan masih diakukan dengan cara manual.

Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar yang tercermin dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desanya, sehingga desa berpeluang menjadi garda terdepan dalam pembangunan wilayah. Pemerintah Kabupaten Sumedang hingga tahun 2024 telah menginisiasi pengembangan desa digital, dengan capaian sekitar 80 desa digital (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2023). Namun demikian, jika ditinjau secara proporsional, dari total 270 desa yang ada, hanya 25 desa atau sekitar 9,26% yang telah terimplementasi secara optimal sebagai desa digital, sehingga pemerataan transformasi digital desa masih belum tercapai. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik menunjukkan tren positif, tercermin dari peningkatan Indeks Kepuasan Publik dari 88,51 poin pada tahun 2023 menjadi 90,10 poin pada tahun 2024 (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks antara peningkatan kepuasan publik dan ketimpangan implementasi desa digital, yang mengindikasikan kesenjangan penelitian terkait bagaimana efektivitas, faktor penghambat, serta strategi penguatan desa digital berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa secara merata di Kabupaten Sumedang.

Adapun konsep Smart Village merupakan dari bagian *dynamic governance* sebagai berikut:

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Gambar 1: Konsep Smart Village



Konsep Smart Village pada gambar ini menekankan integrasi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efisiensi layanan publik, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Model ini terdiri atas enam elemen utama yang saling terintegrasi, yaitu teknologi sebagai fondasi inovasi desa; living yang berfokus pada keamanan, kenyamanan, dan akses terhadap fasilitas publik; resources yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, keuangan desa, dan sumber daya manusia; village services yang diarahkan pada peningkatan efektivitas administrasi dan kualitas pelayanan publik; tourism sebagai sarana pengembangan potensi lokal dan penguatan branding desa; serta governance yang menitikberatkan pada transparansi, kebijakan berbasis data, dan partisipasi masyarakat.

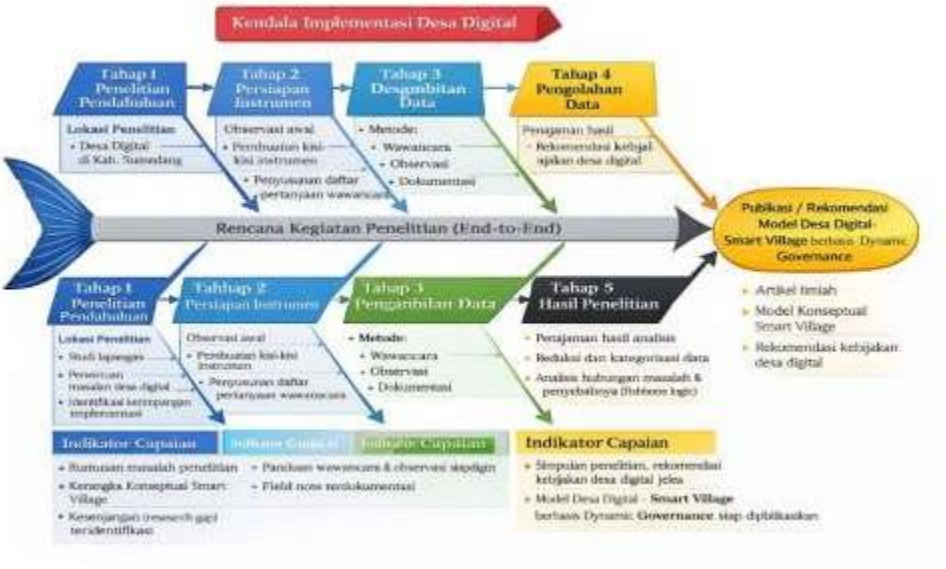
Dalam konteks permasalahan sebelumnya, yakni masih rendahnya proporsi desa digital di Kabupaten Sumedang meskipun indeks kepuasan publik mengalami peningkatan, konsep Smart Village menjadi relevan sebagai kerangka strategis untuk menjembatani ketimpangan tersebut. Melalui pendekatan Dynamic Governance, desa digital didorong untuk memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan, fleksibilitas kebijakan, serta pemanfaatan data dan teknologi secara real-time dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penerapan Smart Village berbasis Dynamic Governance diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mempercepat pemerataan transformasi digital desa, penguatan ekonomi lokal, dan partisipasi masyarakat, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan desa digital di Kabupaten Sumedang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneksporasi keadaan yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menyediakan pendekatan kepada subjek dan menjelaskan fungsinya secara rinci Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang kompleks tentang subjek penelitian, sehingga penelitian kualitatif dapat di implementasikan ke dalam pertanyaan, berfungsi dalam menerapkan penelitian, menjawab sebuah prosedur dengan sampel yang paling dasar, dan memberikan rekomendasi dari hasil penelitian tersebut. Lokasi penelitian di Kabupaten Sumedang pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Desa yang belum optimal dalam dynamic governance.
Dengan alir diagram sebagai berikut:

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Gambar 2: Alir Diagram



PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Model Dynamic Governance Desa Digital dalam Mewujudkan Masyarakat Informatif di Kabupaten Sumedang. Pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penerapan tata kelola pemerintahan yang dinamis melalui pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang memiliki akses, kemampuan, dan kesadaran dalam memperoleh serta memanfaatkan informasi secara efektif. Analisis dalam penelitian ini tidak hanya melihat aspek ketersediaan infrastruktur dan layanan digital di tingkat desa, tetapi juga memperhatikan kapasitas pemerintah desa, proses adaptasi terhadap perubahan, partisipasi masyarakat, serta kemampuan dalam menghasilkan inovasi pelayanan berbasis digital. Oleh karena itu, hasil penelitian pada bagian ini menjadi dasar dalam merumuskan model Dynamic Governance Desa Digital yang kontekstual dan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang adaptif, responsif, inovatif, dan berorientasi pada penguatan masyarakat informatif di Kabupaten Sumedang. Menurut Teori *dynamic governance* (tata kelola dinamis) yang dikemukakan oleh Neo Boon Siong dan Geraldine Chen (2007) adalah kemampuan pemerintah untuk terus-menerus menyesuaikan kebijakan publik serta mengubah cara perumusan dan implementasinya agar tetap relevan. Dengan indikator sebagai berikut:

Gambar 3: Alur Dynamic Governance



Sumber: Neo & Chen, 2007, p. 13

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Model pada gambar tersebut menggambarkan kerangka Dynamic Governance yang menjelaskan bagaimana organisasi atau pemerintahan dapat menghadapi perubahan dan ketidakpastian melalui kemampuan adaptif. Kerangka ini bertumpu pada budaya (culture) yang mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, meritokrasi, orientasi pasar, pragmatisme, multirasialisme, serta nilai adaptasi, pembelajaran, pertumbuhan, stabilitas, kehati-hatian, dan kemandirian. Budaya tersebut menjadi landasan bagi kapabilitas *(capabilities*) yang terdiri atas tiga kemampuan utama, yaitu *Thinking Ahead* untuk mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian masa depan, *Thinking Again* untuk mengevaluasi serta memperbaiki kebijakan dan praktik yang telah berjalan, dan Thinking Across untuk belajar dari pengalaman, ide, maupun praktik eksternal. Ketiga kemampuan tersebut didukung oleh *Able People* atau sumber daya manusia yang kompeten serta *Agile Processes* atau proses pemerintahan yang lincah dan fleksibel. Selanjutnya, kemampuan tersebut menghasilkan *Adaptive Policies*, yaitu kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan dan perubahan lingkungan, yang kemudian diwujudkan melalui policy execution hingga menghasilkan *Dynamic Governance*. Dalam konteks Desa Digital di Kabupaten Sumedang, model ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital desa tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kapasitas aparatur, kemampuan belajar dan beradaptasi, keterbukaan terhadap praktik dari luar, serta budaya pemerintahan yang mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang semakin informatif.

Thinking Ahead Desa Digital Dalam Mewujudkan Masyarakat Informatif Di Kabupaten Sumedang

Thinking Ahead merupakan salah satu kapabilitas utama dalam konsep Dynamic Governance yang menekankan kemampuan pemerintah untuk melihat ke depan, mengantisipasi berbagai perubahan, serta mempersiapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masa mendatang. Dalam konteks Desa Digital di Kabupaten Sumedang, *Thinking Ahead* menjadi penting karena perkembangan teknologi digital berlangsung secara dinamis dan terus memengaruhi pola pelayanan pemerintahan, akses informasi, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa dituntut tidak hanya mampu merespons perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memprediksi kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi peluang dan risiko digitalisasi, serta menyiapkan kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi yang mampu menjawab kebutuhan di masa depan. Pembahasan pada bagian ini menguraikan bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi tren teknologi, membaca kebutuhan masyarakat, mempersiapkan inovasi, dan merancang arah pengembangan Desa Digital dapat mendukung terbentuknya masyarakat yang semakin mudah mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara efektif.

Antisipasi Tren Teknologi Desa Digital Dalam Mewujudkan Masyarakat Informatif Di Kabupaten Sumedang

Antisipasi terhadap perkembangan dan tren teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun Desa Digital yang adaptif dan berkelanjutan di Kabupaten Sumedang. Perubahan teknologi yang berlangsung cepat menuntut pemerintah desa tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi yang tersedia saat ini, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membaca arah perkembangan teknologi dan mempersiapkan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Dalam konteks ini, Desa Digital perlu diarahkan pada penguatan layanan publik berbasis digital, peningkatan akses dan literasi informasi masyarakat, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, serta pengembangan inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan desa. Kemampuan dalam mengantisipasi tren tersebut menjadi bagian dari prinsip *Thinking Ahead* dalam konsep *Dynamic Governance*, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengenali perubahan, memproyeksikan kebutuhan masa depan, serta menyiapkan strategi dan kebijakan yang relevan. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini difokuskan pada bagaimana pemerintah desa di Kabupaten Sumedang mengidentifikasi perkembangan teknologi, merespons peluang dan tantangan digitalisasi, serta mempersiapkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

perubahan teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat informatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang, Kepala Bidang Informatika Teten Kurniadi. ST.,MM. pada hari Kamis, 18 Juni 2026. Mengenai Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam teknologi digital di desa dalam jangka 5-10 tahun. Bahwa:

> *"Teknologi digital dipandang sebagai sarana penting untuk meningkatkan kualitas, kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Dalam 5–10 tahun ke depan, digitalisasi diharapkan dapat mempercepat akses informasi, pelayanan administrasi, serta mendukung pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien".*(18 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang memandang teknologi digital bukan sekadar alat bantu administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mentransformasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam jangka panjang. Dalam perspektif *Dynamic Governance*, pandangan ini mencerminkan kemampuan Thinking Ahead, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengantisipasi perubahan dan mempersiapkan kebutuhan masa depan. Pemanfaatan teknologi digital dalam 5–10 tahun ke depan diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat, mempermudah pelayanan administrasi desa, mengurangi proses yang bersifat manual, serta meningkatkan efisiensi kerja aparatur pemerintahan desa. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang bagi pemerintah desa untuk memanfaatkan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Dengan demikian, orientasi digitalisasi yang disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Sumedang menunjukkan adanya upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih cepat, efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang mampu mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara optimal.

Sependapat dengan pernyataan Camat Cimalaka yang diwawancara pada Hari Kamis 18 Juni 2026, Bapak Yayat menyatakan bahwa:

> "*Pemerintah Desa mengantisipasi kebutuhan keahlian baru dengan meningkatkan kompetensi perangkat desa secara berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan pendampingan terkait teknologi informasi. Selain itu, perangkat desa didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi, termasuk penggunaan aplikasi pemerintahan digital, pengelolaan data, keamanan informasi, serta pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pekerjaan administratif. Desa juga berupaya menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun instansi terkait dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Di samping itu, dilakukan regenerasi dan peningkatan literasi digital bagi aparatur desa agar tersedia sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dengan langkah tersebut, diharapkan perangkat desa dapat terus mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat."* (18 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kabupaten Sumedang menyadari bahwa keberhasilan transformasi menuju Desa Digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Antisipasi terhadap kebutuhan keahlian baru dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur desa secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun pendampingan. Kompetensi yang dikembangkan tidak terbatas pada kemampuan menggunakan aplikasi pemerintahan digital, tetapi juga mencakup pengelolaan data, keamanan informasi, serta pemanfaatan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan administratif. Upaya membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan instansi terkait juga menunjukkan adanya kesadaran bahwa pengembangan kapasitas aparatur membutuhkan dukungan dan pengetahuan dari berbagai pihak. Sementara itu, regenerasi aparatur dan peningkatan literasi digital menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital di tingkat desa. Jika dikaitkan dengan konsep Thinking Ahead, kondisi tersebut memperlihatkan kemampuan pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia sebelum perubahan teknologi terjadi

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

secara lebih luas, sehingga aparatur desa tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga dapat memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Desa Digital yang adaptif sekaligus masyarakat yang informatif.
Dilanjut wawancaranya oleh lurah Kota Utara, Kamis 18 Juni 2026. Bahwa:

> *"Di Kabupaten Sumedang, kami sudah lama menggeser paradigma lama. Teknologi digital di tingkat desa tidak boleh lagi dianggap sekadar alat bantu ketik atau pembuat surat pengantar otomatis. Target jangka panjang kami adalah menjadikannya sebagai utilitas dasar sama krusialnya dengan jalan raya atau jaringan air bersih sekaligus mesin utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri*."(18 Juni 2026)

Visi Desa Digital

Dalam perspektif Thinking Ahead, visi Desa Digital menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membangun arah dan tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta berbagai tantangan yang berpotensi muncul di masa depan. Visi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk tidak hanya merespons perkembangan digital yang terjadi saat ini, tetapi juga mengantisipasi kondisi pemerintahan dan masyarakat di masa mendatang melalui perencanaan yang terarah dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Sumedang, visi Desa Digital diarahkan pada pemanfaatan teknologi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses informasi, memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, *Thinking Ahead* dalam visi Desa Digital menunjukkan kemampuan pemerintah untuk membayangkan kondisi ideal yang ingin dicapai, mengenali peluang dan risiko perubahan teknologi, serta menyiapkan kapasitas, kebijakan, dan inovasi sejak dini, sehingga transformasi digital desa tidak bersifat sementara, melainkan mampu berkembang secara adaptif dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat yang informatif.
Berdasarkan pernyataan Kepala Camat Cimalaka, Bapak Yayat bahwa:

> *"Visi utama penerapan program Desa Digital adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah desa ingin meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat akses layanan bagi masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Selain itu, Desa Digital diharapkan mampu mendorong peningkatan literasi digital masyarakat, memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan UMKM dan potensi lokal berbasis teknologi, serta memperluas akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya desa yang mandiri, inovatif, inklusif, dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan."*(18 Juni 2026)

Pernyataan Camat Cimalaka tersebut menunjukkan bahwa visi Desa Digital tidak semata-mata berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi diarahkan sebagai instrumen transformasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dari perspektif *Thinking Ahead*, visi tersebut memperlihatkan adanya upaya pemerintah untuk memproyeksikan kondisi desa yang ingin dicapai di masa depan, yaitu pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel dengan dukungan teknologi digital. Pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan juga menunjukkan kesiapan pemerintah untuk membangun tata kelola yang lebih berbasis informasi sehingga kebijakan dan pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, visi tersebut tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem digital melalui peningkatan literasi digital, pengembangan UMKM dan potensi ekonomi lokal, serta perluasan akses terhadap informasi, pendidikan, dan berbagai layanan publik. Dengan demikian, visi Desa Digital yang disampaikan Camat Cimalaka mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membayangkan kebutuhan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

dan peluang masa depan sekaligus mempersiapkan strategi untuk mencapainya, sehingga Desa Digital diharapkan berkembang menjadi desa yang mandiri, inovatif, inklusif, dan berdaya saing serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Sumedang, yang dilakukan wawancara pada tanggal 18 Juni 2026, bahwa:

> *"Visi atau Tujuan Penerapan Desa Digital adalah dalam pelayanan cepat dan mudah, dapat melaksanakan pelayanan 24 jam, dalam pelayanan tanpa ada diskriminasi dalam tujuan pemerintahan yaitu adanya transparansi anggaran dan memanilisir terjadinya KKN".(18 Juni 2026)*

Berdasarkan Pernyataan dari Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tersebut menunjukkan bahwa visi penerapan Desa Digital diarahkan pada perubahan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa agar lebih cepat, mudah, terbuka, dan adil. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan secara lebih fleksibel, termasuk melalui layanan yang dapat diakses selama 24 jam, sehingga pelayanan tidak sepenuhnya bergantung pada batas waktu kerja aparatur. Prinsip pelayanan tanpa diskriminasi juga menunjukkan bahwa digitalisasi diharapkan mampu memberikan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintah desa.

Identifikasi Peluang & Risiko

Dalam perspektif *Thinking Ahead*, identifikasi peluang dan risiko merupakan langkah penting bagi pemerintah desa dalam mengantisipasi perkembangan digitalisasi di masa depan. Pemerintah perlu mampu mengenali berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan melalui teknologi digital, sekaligus mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghambat keberlanjutan program Desa Digital. Peluang tersebut dapat berupa peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses informasi, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat, sedangkan risikonya dapat berkaitan dengan kesenjangan literasi digital, keamanan data, keterbatasan infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia. Kemampuan menyeimbangkan peluang dan risiko tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun strategi yang adaptif, sehingga transformasi digital dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat informatif di Kabupaten Sumedang.

Berkaitan identifikasi peluang dan risiko berdasarkan pernyataan Dinas pemberdayaan Masyarakat. Bahwa:

> *"BUMdesa bisa menjadi pengelola markerplace produk-produk yang dihasilkan oleh desa baik hasil pertanian, peternakan ataupun kerajinan, sehingga produk unggulan desa tersebut bisa langsung dipasarkan ke konsumen. BUMDesa bisa melayani Masyarakat dengan keuangan digital melalui Kerjasama dengan perbankan seperti untuk pembayaran tagihan-tagihan air, Listrik, pajak, transfer uang. BUMDes bisa mempromosikan wisata desa melalui digitalisasi untuk tiket masuk, pemesanan penginapan dan makanan minum dengan pembayaran melalui Qris misalnya" (18 Juni 2026)*

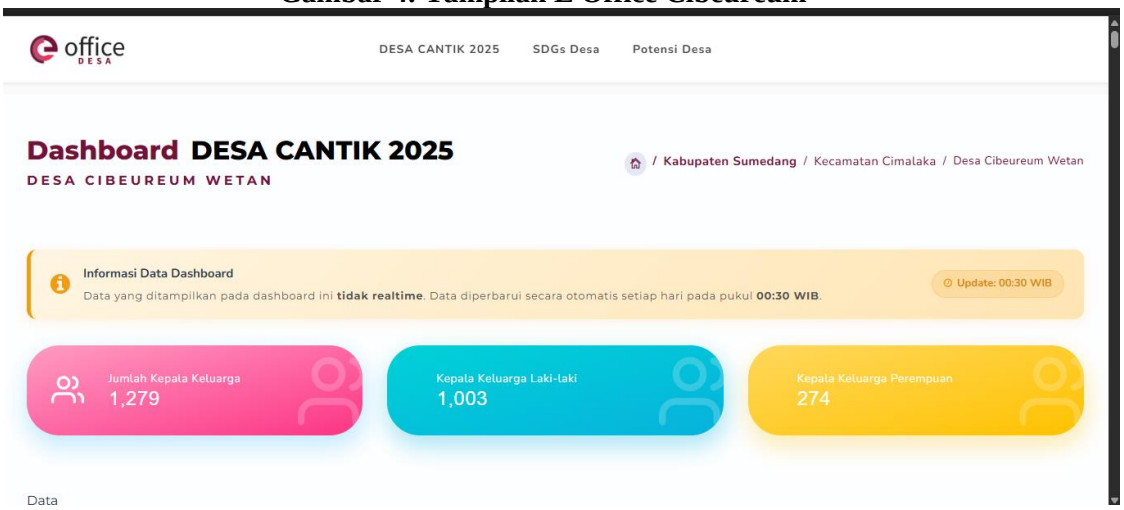
Pernyataan DPMD Kabupaten Sumedang tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi Desa Digital membuka peluang bagi BUMDesa untuk berkembang menjadi penggerak ekonomi sekaligus penyedia layanan digital bagi masyarakat desa. Melalui pengembangan *marketplace* desa, BUMDesa dapat mempertemukan produk-produk unggulan lokal seperti hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan dengan konsumen secara lebih luas, sehingga pemasaran tidak lagi terbatas pada wilayah desa dan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, pemanfaatan layanan keuangan digital melalui kerja sama dengan perbankan memungkinkan BUMDesa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran tagihan, pajak, maupun transaksi transfer tanpa harus mengakses layanan perbankan secara langsung. Digitalisasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata desa melalui pemasaran destinasi, pemesanan tiket, penginapan, serta makanan dan minuman yang didukung pembayaran digital seperti QRIS. Dalam perspektif *Thinking Ahead*, pernyataan tersebut memperlihatkan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi peluang ekonomi dan pelayanan yang

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

dapat dikembangkan melalui teknologi sejak dini, sehingga digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih terintegrasi, produktif, dan berdaya saing.

Berdasarkan pengamatan kami yang berada di website *E office* Desa Cibeurem sebagai tujuan penelitian kami. Dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 4: Tampilan E Office Cibeureum



Berdasarkan indikator Identifikasi Peluang dan Risiko dalam dimensi Thinking Ahead, dashboard Desa Cantik 2025 Desa Cibeureum Wetan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memanfaatkan data digital sebagai dasar untuk membaca kondisi sosial dan merencanakan pembangunan secara lebih akurat. Dashboard menampilkan informasi kependudukan, seperti 1.279 kepala keluarga, terdiri atas 1.003 kepala keluarga laki-laki dan 274 kepala keluarga perempuan, yang menjadi data awal dalam mengidentifikasi karakteristik masyarakat serta kebutuhan layanan publik. Ketersediaan data yang terintegrasi ini membuka peluang bagi pemerintah desa untuk menyusun kebijakan berbasis data (evidence-based policy), meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan, pelayanan administrasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, sistem digital seperti Desa Cantik juga memperkuat transparansi informasi serta memudahkan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Dynamic Governance dalam pengembangan Desa Digital di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa transformasi digital desa tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi dan layanan berbasis digital. Keberhasilan Desa Digital sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan kapasitas aparatur, membaca kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan kebijakan dan inovasi yang sesuai dengan kondisi desa. Hal ini sejalan dengan kondisi Kabupaten Sumedang yang telah memiliki berbagai inisiatif Desa Digital, tetapi implementasinya masih belum merata di seluruh desa. Pada dimensi *Thinking Ahead*, pemerintah Kabupaten Sumedang dan pemerintah desa telah menunjukkan upaya untuk mempersiapkan Desa Digital dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Hal tersebut terlihat dari rencana penguatan layanan publik digital, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendampingan, pemanfaatan data, serta mulai dikenalnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI). Visi Desa Digital juga tidak hanya diarahkan pada pelayanan yang lebih cepat dan mudah, tetapi mencakup transparansi, akuntabilitas,

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

peningkatan literasi digital, penguatan UMKM, pengembangan potensi lokal, serta perluasan akses informasi bagi masyarakat.

Penelitian juga menemukan bahwa digitalisasi membuka peluang yang lebih luas bagi desa untuk mengembangkan potensi ekonomi dan pelayanan masyarakat. BUMDesa, misalnya, dapat berperan sebagai pengelola marketplace produk lokal, penyedia layanan keuangan digital, serta penggerak promosi pariwisata desa. Pemanfaatan dashboard dan data kependudukan di Desa Cibeureum Wetan juga menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Dengan demikian, Desa Digital tidak semestinya dipahami hanya sebagai digitalisasi administrasi pemerintahan, tetapi sebagai ekosistem tata kelola yang menghubungkan pelayanan publik, informasi, partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi desa. Dengan demikian, Model Dynamic Governance Desa Digital dalam mewujudkan masyarakat informatif di Kabupaten Sumedang perlu dibangun melalui keterpaduan antara budaya pemerintahan yang adaptif, aparatur yang kompeten, proses pemerintahan yang lincah, kemampuan *Thinking Ahead, Thinking Again,* dan *Thinking Across*, serta kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Teknologi pada akhirnya bukan tujuan utama, melainkan sarana untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih responsif dan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi. Tantangan ke depan adalah memastikan agar transformasi tersebut tidak hanya terjadi pada desa-desa yang telah maju secara digital, tetapi dapat diperluas secara merata, inklusif, dan berkelanjutan ke seluruh desa di Kabupaten Sumedang.

REFERENSI

Afriyani, A., Wahidah, I., & Wibowo, M. T. H. (2021). Penerapan digital government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 3*(2), 147–158. https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13572

Castells, M. (2004). *The network society*. Edward Elgar Publishing.

Pemerintah Kabupaten Sumedang. (2023, July 13). *Indeks Desa Membangun Sumedang peringkat ke-2 tingkat Jawa Barat*. https://sumedangkab.go.id/berita/detail/indeks-desa-membangun-sumedang-peringkat-ke-2-tingkat-jabar

Pemerintah Kabupaten Sumedang. (2025, April 9). *Ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah*. https://sumedangkab.go.id/data/pengumuman/pengumuman_20250409033410.pdf

Purnawingwulan, M. M., et al. (2015). Development of e-desa policy model in Bandung Regency (education qualification technology of perangkat desa). *Edutech, 14*(2), 167. https://doi.org/10.17509/edutech.v14i2.1376

Rahayu, R., Iskandar, S., & Abidin, Y. (2022). Inovasi pembelajaran abad 21 dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Basicedu, 6*(2), 2099–2104. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2082

Sari, A. I., & Rusli, Z. (2023). Tata kelola pemerintahan dinamis (dynamic governance) dalam penyelenggaraan kota layak anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Saraq Opat, 5*, 22–31. https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/SaraqOpat

Surahman, S. (2018). Public figure sebagai virtual opinion leader dan kepercayaan informasi masyarakat. *Wacana, 1*, 53–63. https://apjii.or.id/survei2017